Jurnal Wacana Kinerja
Volume 20 | Nomor 2 | November 2017

KEBIJAKAN MIGRASI LINTAS NEGARA PEMERINTAH INDONESIA (STUDI KASUS PENGIRIMAN TENAGA KERJA INDONESIA KE MALAYSIA)[1]

INDONESIA'S CROSS COUNTRY MIGRATION POLICY (A CASE STUDY OF INDONESIAN MIGRANT WORKERS AT MALAYSIA)

Yogi Suprayogi Sugandi dan Dudi Heryadi[2]

Universitas Padjadjaran
Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21 Jatinangor, Sumedang
Telp/Fax. (022) 7796626

(Diterima 27 Maret 2017; revisi 7 November 2017)

Abstract

Transnational migration has many aspects of a human being through it, ranging from economic, social, cultural and political. The Indonesian government policy to deliver Labor in his country to Foreign Affairs started in the era of the 70s where Indonesia through a program sending teachers to neighboring Malaysia. This paper will describe the policies of the government of Indonesia which already exist or are not there, about the delivery policy of Labour Indonesia to Malaysia in the era of Susilo Bambang Yudhoyono's administration. With the establishment BPNP2TKI, then the policy of sending migrant workers abroad should have been many improvements. In it will put forward various criticisms and suggestions in handling migrant workers in Malaysia.

***Keywords**: Migration Policy, Labor and Government of Indonesia SBY*

Abstrak

Migrasi lintas negara memiliki banyak aspek seorang manusia menjalaninya, mulai dari aspek ekonomi, sosial, budaya dan politik. Kebijakan Pemerintah Indonesia untuk mengirimkan Tenaga Kerja dalam negerinya ke Luar Negeri dimulai pada era 70-an dimana Indonesia melalui program pengiriman guru ke negara tetangga Malaysia. Tulisan ini akan memaparkan kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia yang ada terutama mengenai kebijakan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Malaysia. Dengan dibentuknya BPNP2TKI sebagai salah satu kebijakan dari zaman

[1] Makalah ini disampaikan dalam Seminar Internasional Hubungan Indonesia dan Malaysia, di Universitas Andalas, Padang, 6-10 November 2010.

[2]*Email : yogi.suprayogi@unpad.ac.id*

pemerintahan SBY, maka kebijakan pengiriman tenaga migran ke luar negeri seharusnya sudah banyak perbaikan-perbaikan. Didalamnya akan dikemukakan berbagai kritik dan saran dalam penanganan TKI di Malaysia.

Kata Kunci: Kebijakan Migrasi, Tenaga Kerja Indonesia dan Pemerintahan SBY

1. PENDAHULUAN

Migrasi manusia dimuka bumi ini merupakan migrasi yang tidak dapat dilihat hanya dari perbatasan lintas negara ataupun lintas samudra dan lautan, migrasi ini sudah ada semenjak manusia berevolusi dahulu. Masyarakat yang bermigrasi ini dikarenakan banyak faktor, seperti bencana alam, ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Migrasi lintas negara ini sudah ada sebelum negara Indonesia berdiri.

Pada era modern saat ini pun Indonesia menjadi penyumbang terbesar dalam migrasi internasional di Asia Tenggara, setelah Filipina. Migrasi lintas negara ini dilakukan oleh penduduk Indonesia rata-rata untuk mencari penghidupan yang lebih layak. Beberapa tujuan negara yang dilintasi para migran ini antara lain ke beberapa negara Asia seperti Hongkong, Taiwan, Malaysia, Singapura dan Jepang. Penggunaan jalur laut, udara dan darat merupakan pilihan yang paling mudah saat ini. Pembebasan penggunaan visa (izin mengunjungi) di kawasan asia tenggara mempermudah para migran dari Indonesia bepergian ke negara-negara di asia tenggara.

Pada era Susilo Bambang Yudhoyono yang berkuasa sejak 2004 dan kembali berkuasa pada tahun 2008 lalu salah satu migrasi lintas negara yang dilakukan oleh penduduk di Indonesia semakin banyak, sehingga timbulah berbagai masalah yang ada di negara tujuan. Pasar tenaga kerja di Indonesia sendiri pada saat ini cenderung sedikit jika dibandingkan dengan negara-negara di asia tenggara. Negara tersebut memiliki tingkat perekonomian lebih baik dari Indonesia serta permintaan tenaga kerja selalu banyak dari negara-negara seperti Malaysia, Hongkong, Taiwan dan sebagainya. Tenaga Kerja Indonesia diperhitungkan di berbagai sektor diantaranya sektor informal ataupun semi informal. sektor informal merupakan tenaga kerja yang tidak memiliki keterampilan sama sekali sedangkan semi informal adalah tenaga kerja yang memiliki keterampilan ataupun kemampuan yang tidak terlalu besar.

Kebijakan Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia di Sektor Informal ini perlu diikuti dengan kemampuan pemerintah mengelola pemenuhan tenaga kerja asing ini dengan secara terus menerus. Oleh karena itu kajian ini akan lebih memperlihatkan bagaimana pengelolaan TKI dan TKW Indonesia yang bekerja di Malaysia di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

2. TINJAUAN TEORI DAN PENELITIAN SEBELUMNYA

2.1. Kerangka Pemikiran

Analisis mengenai migrasi telah dilakukan oleh beberapa peneliti baik dari dalam maupun luar negeri. Para ekonom mulai dari Lewis, dilanjutkan oleh Fei dan Rannis yang kemudian dikenal dengan teori LFR (Lewis-Fei-Rannis) menyatakan bahwa perpindahan penduduk pada dasarnya terjadi karena adanya perbedaan antara sektor kota yang modern dan sektor desa yang tradisional (Lewis, 1954) (Fei & Rannis, 1961). Demikian pula yang dikemukakan oleh Todaro dimana seseorang akan pindah dari desa ke kota karena mengharapkan pendapatan yang lebih tinggi (Todaro, 1969).